

**ORIENTASI KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILU GUBERNUR
TAHUN 2024 (STUDI PADA PARTAI NASDEM, PKS, DAN PKB)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD FARYCHO ABUNG

2056021008



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

ORIENTASI KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILU GUBERNUR TAHUN 2024 (STUDI PADA PARTAI NASDEM, PKS, DAN PKB)

Oleh

MUHAMMAD FARCYHO ABUNG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola koalisi partai politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2024, dengan fokus pada dinamika Koalisi Perubahan. Penelitian ini mengangkat tiga isu utama: (1) bagaimana persamaan ideologi dan tujuan menjadi dasar pembentukan koalisi, (2) mengapa format Koalisi Perubahan yang terbentuk di tingkat nasional tidak sepenuhnya tercermin dalam konstelasi politik daerah, dan (3) apakah pembagian kekuasaan dan posisi strategis turut memengaruhi konfigurasi koalisi di tingkat lokal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci, yaitu Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem DPW Lampung, anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Sekretaris PKB DPW Provinsi Lampung, dan Tim Sukses Pemenangan pasangan calon Mirzani-Jihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesamaan ideologi dan tujuan menjadi dasar awal pembentukan Koalisi Perubahan, implementasinya di tingkat lokal mengalami fragmentasi. Faktor utama yang memengaruhi perbedaan tersebut adalah pertimbangan pragmatis, kesiapan mesin politik, kecocokan figur calon, serta negosiasi distribusi kekuasaan dan peran strategis. Dinamika politik lokal yang cair dan lebih transaksional juga turut mendorong perubahan arah koalisi, sehingga tidak semua partai Koalisi Perubahan di tingkat nasional terlibat dalam Pilgub Lampung. Penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan variabel lokal dalam membangun koalisi yang konsisten dan efektif.

Kata Kunci : Koalisi Partai Politik, Pilgub, Koalisi Perubahan, Ideologi, Pembagian Pekuasaan.

ABSTRACT

ORIENTATION OF POLITICAL PARTY COALITIONS IN THE 2024 GOVERNORAL ELECTIONS (A STUDY OF THE NASDEM, PKS, AND PKB PARTIES)

By

MUHAMMAD FARCYHO ABUNG

This study aims to analyze the patterns of political party coalitions in the 2024 gubernatorial election of Lampung Province, focusing on the dynamics of the Coalition for Change. The research addresses three key issues: (1) how ideological and goal alignment serves as the basis for coalition formation, (2) why the structure of the national Coalition for Change is not fully reflected in the regional election, and (3) whether power-sharing and strategic positioning influence local coalition configurations. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including the Vice Chair of Electoral Affairs of the NasDem Party (Lampung DPW), a member of the PKS parliamentary faction in the Lampung Provincial DPRD, the Secretary of the PKB Lampung DPW, and the Campaign Team of the Mirzani-Jihan candidate pair. The findings indicate that while ideological and goal alignment serves as a foundational element for coalition formation, its implementation at the local level is fragmented. This divergence is driven primarily by pragmatic considerations, political readiness, candidate compatibility, and negotiations over power distribution and strategic roles. The fluid and increasingly transactional nature of local political dynamics has also contributed to shifts in coalition direction, leading to the exclusion of some national Coalition for Change parties from the Lampung gubernatorial race. This study underscores the importance of local variables in constructing consistent and effective coalitions..

Keywords: Political party coalition, Lampung Gubernatorial Election, Coalition for Change, Ideology, Power-sharing

**ORIENTASI KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILU GUBERNUR
TAHUN 2024 (STUDI PADA PARTAI NASDEM, PKS, DAN PKB)**

Oleh

MUHAMMAD FARCYHO ABUNG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **ORIENTASI KOALISI PARTAI POLITIK
PADA PEMILU GUBERNUR TAHUN 2024
(STUDI PADA PARTAI NASDEM, PKS,
DAN PKB)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Farycho Abung**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2056021008**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darmawan'.

Darmawan Purba, S. IP, M. IP
NIP. 1988092320 1903 1 011

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bendi Juantara'.

Bendi Juantara, S.I.P., M.A
NIP. 1988092320 1903 1 011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tabah Maryanah'.

Tabah Maryanah

MENGESAHKAN

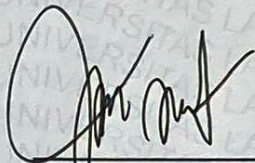
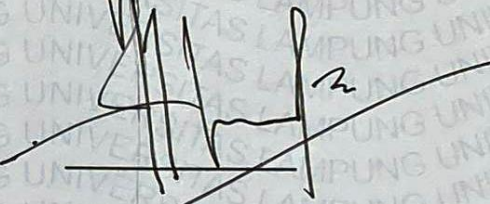
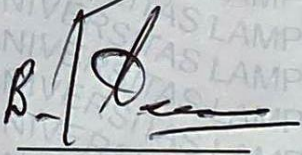
1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S. IP, M. IP.

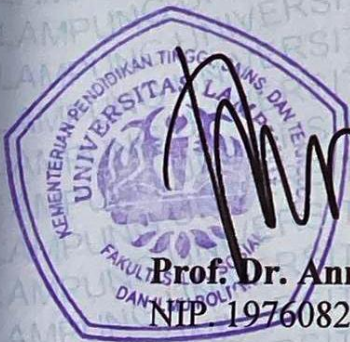
Sekretaris : Bendi Juantara, S.I.P., M.A

Penguji Utama : Budi Harjo, S.Sos., M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Farcyho Abung
NPM 2056021008

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Farycho Abung dilahirkan di Kotabumi, 21 Desember 2001. Penulis merupakan anak tunggal, dari Bapak Das'at Abung dan Ibu Sepia Nirwana.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2008-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 07 Kotabumi pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2020.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan dan bergabung pada Himpunan Mahasiswa Islam Memasuki tahun 2022, penulis berada dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Biro III Kajian dan Keilmuan dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Demikianlah segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2020 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO HIDUP

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Hasyr ayat 18)

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan.”

(Dawn Clark)

“Yakin Usaha Sampai”

(M Farycho Abung)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

Kedua orang tuaku Ayah dan Bunda tercinta

Das'at Abung dan Sepia Nirwana

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“POLA KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 (STUDI PADA PARTAI POLITIK KOALISI PERUBAHAN)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“POLA KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 (STUDI PADA PARTAI POLITIK KOALISI PERUBAHAN)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP dan Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terimakasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;
9. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.;
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;

11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Kedua orang tua ku tercinta, malaikat tak bersayap, Bapak Das'at Abung dan Ibu Sepia Nirwana. atas segala doa yang tercurah limpahkan, kasih sayang tiada tara. Segala dukungan dalam berbagai bentuk, yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih untuk Bunda dan Ayah yang sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada ku. Terimakasih telah kuat dan sabar dalam memberikan pengajaran, membimbing, dan membina anak-anakmu bahkan hingga mengerahkan segala kemampuan agar anakmu dapat merasakan bangku perkuliahan.
13. Teruntuk keluarga besar Komisariat Politik Unila terimakasih telah mengajarkan kepada saya telah banyak mengajarkan saya tentang kehidupan dan pembelajaran-pembelajaran yang tidak saya dapatkan dikampus.
14. Keluarga Anggrek, terimakasih banyak karena telah banyak mensupport saya dan membantu saya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak lagi tentang hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga.
16. Semua pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
17. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walaupun sering merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak

menyerah sesulit apapun perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam wawancara ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa pikiran. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juli 2025
Peneliti

Muhammad Farycho Abung
NPM. 2056021008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Tentang Partai Politik	18
2.1.1 Definisi Partai Politik	18
2.1.2 Fungsi Partai Politik	20
2.1.3 Tipologi Partai Politik	23
2.1.4 Pembagian Arena Kompetisi Partai	27
2.1.5 Pragmatisme Partai Politik	28
2.2 Tinjauan Tentang Koalisi Partai Politik	13
2.2.1 Pengertian Koalisi Partai Politik	13
2.2.2 Sumber Daya Koalisi Partai Politik	14
2.2.3 Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik	15
2.2.4 Motif Koalisi Partai Politik	17
2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub)	32
2.3.1 Pengertian Pemilihan Gubernur (Pilgub)	32
2.3.2 Asas dan Sistem Pemilihan Umum	33

2.3.3 Pemilihan Kepada Daerah.....	33
2.4 Konsep Orientasi Koalisi	36
2.4.1 Definisi Orientasi Koalisi	36
2.4.2 Orientasi Koalisi Idealis	37
2.4.3 Orientasi Koalisi Pragmatis	38
2.5 Kerangka Pikir.....	38
III METODE PENELITIAN	39
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Fokus Penelitian	40
3.3 Penentuan Informan	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data	47
IV GAMBARAN UMUM	49
4.1 Gambaran Umum Partai Nasdem.....	49
4.1.1 Visi dan Misi Partai Nasdem	51
4.2 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	53
4.3 Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	56
4.3.1 Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa	57
4.4 Gambaran Umum Partai Koalisi Perubahan	58
V HASIL DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Jumlah Kursi yang Dibutuhkan.....	63
5.2 Kebutuhan akan Keuntungan Politik.....	66
5.3 Strategi Rasional.....	69

VI KESIMPULAN DAN SARAN	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara 18 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2024	3
Tabel 2. Hasil Perolehan Suara 12 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014	4
Tabel 3. Jumlah Kursi Partai Politik Dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) tahun 2014-2019	5
Tabel 4. Fungsi Partai Dalam Negara Demokrasi	23
Tabel 5. Data Informan Dalam Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Koalisi Perubahan.....	6
Gambar 2. Partai Anggota Koalisi Perubahan	7
Gambar 3. Kerangka Pikir	36

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) merupakan perjalanan politik yang panjang dan diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik serta kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional (Suharizal dalam Susilawan dkk dalam Jurnal Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2015).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) langsung sebagai bentuk amanat normatif atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan partisipatif, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Melalui Undang-undang di atas menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang juga mulai diwarnai dengan keberadaan bendera partai politik yang berbeda-beda sebagai imbas dari adanya demokrasi.

Demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan. Partai-partai politik memainkan peranan penting dalam proses perwakilan. Keberadaan partai politik dalam era demokrasi modern menandakan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik, baik yang otoriter atau yang demokratis sekalipun.

Meskipun fungsi partai politik tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi, tetapi dalam fenomena politik yaitu pemilihan umum, partai politik tetap menjalankan beberapa dari keseluruhan fungsinya seperti;

1. Aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu (Hazan dan Gideon, 2010: 168);
2. Pelatihan elit (Pamungkas, 2011:17);
3. Mengartikulasikan kepentingan politik. (Dalton dan Wattenberg, 2005:5).

Syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan calon dalam pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah disebutkan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Syarat partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan pasangan calon, harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari 85 kursi DPRD Lampung, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Lampung. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka secara praktis tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung sendiri calon kepala daerah di Pilgub Lampung 2024, sehingga harus menjalin koalisi.

Syarat pemenuhan jumlah suara sah partai politik dan jumlah kursi di parlemen sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak seluruhnya terpenuhi oleh partai-partai politik yang ada. Terdapat satu partai yang diprediksi menjadi partai pemenang hal ini dikarenakan dari hasil rekapitulasi suara sah partai dan

calon, Partai Gerindra memperoleh kursi paling banyak yaitu 16 kursi. Disusul dengan PDIP 13 kursi, PKB dan Golkar masing-masing 11 kursi, NasDem 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PAN 8 kursi, dan PKS 7 kursi. Berikut hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif seluruh partai politik pada pemilu legislatif Provinsi Lampung 2024:

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara 18 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2024

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara
1.	Partai Kebangkita Bangsa (PKB)	579.245 suara	12.45%
2.	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	806.836 suara	17.34%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	724.522 suara	15.57%
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	670.414 suara	14.41%
5.	Partai NasDem	443.412 suara	9.53%
6.	Partai Buruh	27.738 suara	0.60%
7.	Partai Gelora	27.631 suara	0.59%
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	303.074 suara	6.52%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	6.701 suara	0.14%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	20.815 suara	0.45%
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	14.021 suara	0.30%
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	364.060 suara	7.83%
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	8.431 suara	0.18%
14.	Partai Demokrat	428.727 suara	9.22%
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	93.721 suara	2.01%
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	48.052 suara	1.03%
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	69.049 suara	1.48%
24.	Partai Ummat	15.393 suara	0.33%

Sumber : KPU Provinsi Lampung 2024

Jika dilihat dari perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif seluruh partai politik yang melebihi ambang batas pada pemilu legislatif Provinsi Lampung 2014, tidak ada partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon Gubernur usungan partainya sendiri hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif Provinsi Lampung 2014 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara 12 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Persentase Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	328.832 suara	26.84%
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	154.033 suara	12.57%
3.	Partai Demokrat	146.922 suara	11.99%
4.	Partai Demokrat	146.922 suara	11.99%
5.	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	125.547 suara	10.24%
6.	Partai Nasdem	114.371 suara	9.33%
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	112.581 suara	9.19%
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68.421 suara	5.58%
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30.016 suara	2.45%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	27.247 suara	2.22%

Sumber : Data KPU Provinsi Lampung 2014

Tabel 3. Jumlah Kursi Partai Politik Dalam Parlemen (DPRD Provinsi Lampung) tahun 2014-2019

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Persentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17 kursi	20%
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	10 kursi	11.76%
3.	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	10 kursi	11.76%
4.	Partai Demokrat	11 kursi	12.95%
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7 kursi	8.24%
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8 kursi	9.41%
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8 kursi	9.41%
8.	Partai Nasdem	8 kursi	9.41%
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 kursi	4.70%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2 kursi	2.36%
	Jumlah	85 Kursi	100%

Sumber : Data KPU Provinsi Lampung 2019

Tidak adanya partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon gubernur usungan partainya selain PDIP menyebabkan terjadinya koalisi partai politik. Koalisi partai politik sebagai hal umum disetiap pemilukada. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam melakukan koalisi partai politik oleh masing-masing partai berbeda-beda yang juga nantinya menghasilkan motif koalisi partai politik yang berbeda pula.

Pada Pilkada 2024 kelak diprediksi akan terjadinya koalisi partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan pasangan calon, harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari 85 kursi DPRD Lampung, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Lampung. Berdasarkan persyaratan itu, tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung sendiri calon kepala daerah di Pilgub Lampung 2024, sehingga harus menjalin koalisi.

Pada tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum untuk memilih Gubernur Lampung periode 2024-2029, hal tersebut dikarenakan masa bakti Dr. (H.C) Ir. H. Arinal Djunaidi selaku Gubernur Lampung terpilih periode 2019-2024 akan segera berakhir. Beberapa calon Gubernur Lampung sudah mulai mendeklarasikan pencalonannya. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis pola koalisi partai pada koalisi perubahan terhadap pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2024.

Koalisi Perubahan, yang secara nasional dikenal sebagai aliansi antara Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mendukung pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tidak serta merta mereproduksi formasi politik yang sama dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2024. Di daerah, partai-partai tersebut menunjukkan fleksibilitas dan orientasi politik yang berbeda. Sebagian justru membentuk koalisi dengan partai-partai yang secara nasional mendukung pasangan capres-cawapres lain. Ketidakkonsistenan pola koalisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena memperlihatkan betapa kuatnya perbedaan antara logika politik nasional dan lokal dalam pembentukan aliansi politik.

Perbedaan pola koalisi antara tingkat nasional dan daerah ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Banyak faktor yang memengaruhinya, baik dari aspek struktural, kultural, hingga kepentingan pragmatis jangka pendek. Salah satu faktor utama adalah perbedaan kepentingan politik di tingkat lokal, yang seringkali lebih dipengaruhi oleh dinamika figur, jaringan kekuasaan lokal, serta basis elektoral partai di daerah. Di tingkat lokal, kekuatan figur atau tokoh lokal (local strongman) sering kali menjadi daya tarik utama dalam pembentukan koalisi. Partai politik cenderung lebih mempertimbangkan potensi kemenangan elektoral calon yang diusung ketimbang kesetiaan ideologis atau aliansi di tingkat pusat. Akibatnya, partai politik di

daerah dapat membentuk koalisi yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan arah koalisi nasional demi memastikan kemenangan dalam pilkada.

Selain itu, desentralisasi politik yang dimulai sejak era reformasi turut memperkuat otonomi daerah dalam mengatur strategi politiknya sendiri. Otonomi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga meluas ke dalam pola komunikasi politik dan manajemen koalisi partai. Struktur partai politik yang cenderung bersifat sentralistik di tingkat nasional mengalami fragmentasi ketika memasuki ruang-ruang politik lokal. Dewan pimpinan daerah (DPD) partai memiliki otonomi dalam merumuskan arah dukungan politik berdasarkan analisis politik lokal masing-masing. Akibatnya, rekomendasi dan arahan dari dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik tidak selalu dijalankan sepenuhnya di daerah, terutama jika dinilai bertentangan dengan kalkulasi politik lokal yang lebih menguntungkan.

Faktor kepentingan elektoral dan distribusi kekuasaan lokal juga menjadi penentu utama dalam pembentukan koalisi di tingkat daerah. Koalisi yang dibentuk di pilkada cenderung sangat pragmatis dan oportunis. Aliansi partai lebih didasarkan pada kemungkinan menang dan berbagi kekuasaan pasca-pemilu, daripada kesamaan visi-misi atau orientasi ideologis. Dalam konteks ini, partai politik di daerah bersifat lebih transaksional. Koalisi dibangun bukan hanya untuk mendukung satu pasangan calon, tetapi juga untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan posisi strategis di pemerintahan daerah apabila pasangan yang diusung menang.

Fenomena lain yang turut memperumit dinamika koalisi di daerah adalah pengaruh figur calon kepala daerah itu sendiri. Banyak calon gubernur yang memiliki kekuatan modal sosial, finansial, maupun simbolik yang besar, bahkan mungkin lebih kuat dibanding struktur formal partai politik lokal. Dalam banyak kasus, figur calon kepala

daerah dapat menjadi pusat gravitasi dari terbentuknya koalisi, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, partai-partai lokal cenderung ‘menyesuaikan diri’ dengan kekuatan kandidat, bukan kandidat yang berusaha menyesuaikan diri dengan partai. Hal ini menandakan terjadinya personalisasi politik dalam pembentukan koalisi, sesuatu yang tidak umum di tingkat nasional di mana struktur dan arah partai lebih terpusat.

Dalam konteks Pilgub Lampung 2024, dinamika ini tampak jelas ketika Koalisi Perubahan tidak tampil sebagai kekuatan tunggal yang mendukung satu pasangan calon gubernur. Sebagian partai anggota Koalisi Perubahan justru membentuk aliansi dengan partai lain yang secara nasional berada dalam kubu yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakterikatan antara kepentingan nasional dan lokal dalam praktik pembentukan koalisi. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kedewasaan demokrasi lokal yang tidak selalu tunduk pada arahan pusat; namun di sisi lain, juga dapat menimbulkan ambiguitas dan inkonsistensi dalam sikap politik partai, yang pada akhirnya dapat membingungkan pemilih.

Tak kalah penting, faktor kepentingan elite lokal dan ekonomi politik daerah juga sangat menentukan konfigurasi koalisi. Banyak elite politik lokal memiliki kepentingan bisnis, akses terhadap proyek pembangunan daerah, serta jejaring birokrasi yang luas, sehingga pembentukan koalisi lebih didasarkan pada akomodasi kepentingan tersebut. Koalisi yang terbentuk sering kali merupakan hasil dari negosiasi intensif antarelite politik daerah, bukan sekadar kesepakatan formal antarpengurus partai. Hal ini membuat koalisi di daerah lebih cair, fleksibel, dan rentan berubah dibandingkan koalisi di tingkat nasional yang lebih stabil dan terikat oleh kesepakatan jangka panjang.

Di sisi lain, perbedaan karakteristik pemilu nasional dan pilkada juga memengaruhi pola koalisi. Pilpres bersifat serentak dan terpusat, dengan hanya dua atau tiga pasangan calon yang bersaing secara nasional. Sebaliknya, pilkada sangat bergantung pada konteks lokal dan memiliki ruang lebih luas untuk variasi konfigurasi pasangan calon dan pendukungnya. Pilpres juga lebih dipengaruhi oleh citra dan isu nasional, sedangkan pilkada lebih dipengaruhi oleh isu lokal, kedekatan sosial-budaya kandidat dengan pemilih, serta ketokohan lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pola koalisi antara pemilu nasional dan pilkada daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari otonomi politik daerah, kekuatan figur calon, kalkulasi pragmatis partai politik, kepentingan elite lokal, hingga struktur dan karakter pemilihan itu sendiri. Dalam konteks ini, studi tentang Koalisi Perubahan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2024 menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana koalisi partai politik bertransformasi ketika memasuki arena politik lokal, serta bagaimana faktor-faktor lokal turut memengaruhi arah dan pola koalisi yang terbentuk.

Sebagai bahan referensi penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kaitannya dengan penelitian :

Pertama, Iranda Putri (2018) , dengan judul “Analisis Motif Koalisi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 (Studi pada Koalisi Partai NasDem, PKS, dan Hanura Provinsi Lampung)”, hasil penelitian menggambarkan bahwa Bentuk pragmatisme dalam koalisi antara Partai NasDem, PKS dan Hanura yaitu; Partai NasDem menempatkan wakil terbaiknya sebagai calon Gubernur Lampung, PKS menempatkan wakil terbaiknya sebagai calon Wakil Gubernur Lampung, dan Partai Hanura mendapat porsi

tersendiri dalam perumusan program-program partai dan juga mendapatkan ruang untuk tetap berkampanye memajukan nama partai menjelang pemilu 2019 mendatang.

Kedua, Ananda Putri (2016), dengan judul “Kartelisasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015”, hasil penelitian menggambarkan bahwa koalisis politik melihat dari segi koalisi partai politik yang berujung kartelisasi menggunakan rational choice theory dengan pendekatan collective-action, konsep partai kartel yang diadaptasi dari Kartz dan Mair sedangkan peneliti pada penelitian ini meneliti motif koalisi partai politik yang menggunakan pemikiran Wolfgang Muller dan Kaare Strom sebagai grand theory yang dilanjutkan dengan pemikiran Abraham De Swaan tentang koalisi ideologis serta Kartz dan Mair tentang koalisi pragmatis.

Ketiga, Bilawal Zandra Fariz (2010), dengan judul “Pengaruh Partai Politik Terhadap Ketidakpastian Koalisi Partai Politik”, hasil penelitian menggambarkan Fenomena perekrutan dan pengangkatan Herman HN sebagai ketua DPW Partai NasDem cenderung oligarki sultanistik yang masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekuasaan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pola relasi patron-klien antara Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem dan Herman HN selaku mantan Walikota Bandar Lampung. Oligarki sultanistik yang di dalamnya marak hubungan patron-klien dan kewenangannya dikuasai oleh penguasa yang memiliki kestabilan posisi sebagai oligarki. Herman HN sebagai elite politik di Lampung sudah banyak memiliki prestasi dan memiliki kekuatan memobilisasi kader sehingga tak butuh waktu lama Herman HN bisa menjadi Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung. Lemahnya sistem rekrutmen anggota partai politik. Sebab, pada tataran praksis, pragmatisme menjadi hierarki tertinggi yang diusung parpol dibanding mengemban tugas luhur dan mulia serta sikap idealisme sebagai partai politik.

Keempat, Achitia Lindi Saputri (2023), dengan judul “Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemenangan Pemilihan Umum 2024” hasil penelitian menggambarkan Mengenal khalayak sebagai langkah Partai Gelora yang berperan sebagai komunikator dalam membangun komunikasi politik yang efektif. kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan Partai Gelora Provinsi Lampung dalam mengenalxz khalayak dinilai belum maksimal. Karena dari 13 kabupaten dan 2 kota yang ada di Lampung hanya mengunjungi 3 daerah yang ada di Lampung. Daerah yang Partai kunjungi dan di unggah dalam akun milik Partai Gelora Provinsi Lampung adalah Desa Totoharjo kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023, Kelurahan Negri Olok Gading Kota Bandar Lampung yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2023.

Kelima, Aldy Nadiantara (2022), dengan judul “Strategi Partai Gelora Untuk Lolos dan Bersaing Dengan Partai Lain Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Dewan Perwakilan Daerah Partai Gelora Kota Bandar Lampung)” hasil penelitian menggambarkan bahwa pada dasarnya Strategi Politik merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk keberlangsung partai politik. Partai gelora memiliki Strategi yang dapat meyakinkan masyarakat Kota Bandar Lampung. Partai Gelora bekerja keras untuk memperoleh basis massa yang banyak dan mencapai untuk lolos dan bersaing dengan partai lain terutama cara Partai Gelora menyiasati anggapan negatif dari masyarakat mengenai pembentukan dari partai politik baru. Masyarakat memang sudah merasa bosan dengan adanya partai politik baru dikarenakan partai politik hanya mementingkan kepentingannya tanpa memedulikan aspirasi dari masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah apakah orientasi koalisi partai politik pada Pemilihan Gubernur pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung tahun 2024 (Studi pada Partai Politik NasDem, PKB, dan PKS Provinsi Lampung)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Peneliti uraikan ke dalam bentuk pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ortientasi birokrasi dari partai pada Koalisi Partai Politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2024 pada Partai Politik Partai Politik NasDem, PKB, dan PKS Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan politik, khususnya dalam bidang Politik yang berkaitan dengan Strategi Pemenangan Partai Dalam Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan refleksi maupun suatu peringatan bagi partai politik dalam memenangkan pemilihan umum

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Koalisi Partai Politik

Pembentukan koalisi menunjukkan peran elit dalam pecaturan politik menjadi sangat dominan dan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan baik skala lokal maupun nasional (Winarsih dkk dalam Jurnal Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit terhadap Karakteristik Koalisi, 2015). Posisi elit atau aktor di daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, posisi elit sangat strategis dalam pengusungan kandidat maupun pembentukan koalisi, namun pertimbangan yang digunakan oleh elit dalam menentukan kebijakan yang diambil belum terlihat jelas.

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut kesediaan partai dan para pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan sekedar mencari teman dan semuanya selesai. Selektif dalam hal koalisi adalah hal yang penting.

2.1.1 Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak

dapat dicapai dengan bekerja sama secara terpisah (Heywood, 2000:194); atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.

Pada sistem multipartai saat kekuatan politik terdistribusi ke dalam banyak simpul partai, terutama sekali sistem pemerintahan parlementer, kebutuhan untuk membangun koalisi adalah kondisi yang tidak terhindarkan. Pada sistem parlementer, ketika tidak ada partai mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai yang ada. Meskipun demikian pada presidensialisme terjadinya koalisi partai juga bukan hal yang mustahil (Pamungkas, 2011:78).

Ada empat arena dalam koalisi partai yang dalam hal ini berada dalam lingkup yang berbeda menurut Heywood yaitu; koalisi elektoral, koalisi legislatif, koalisi pemerintahan dan koalisi besar atau pemerintahan nasional. Studi tentang koalisi ini dibutuhkan untuk mengerti keterikatan aktor-aktor politik dalam membangun suatu kolektivitas (Heywood, 2000:195).

2.1.2. Sumber Daya Koalisi Partai Politik

Studi paling klasik tentang koalisi menempatkan besaran kekuatan partai (*size of party power*) sebagai sumberdaya penentu terbentuknya koalisi partai oleh Theodore Calpow yang membuat simulasi kemungkinan koalisi dari tiga kekuatan (*triad*) yang berbeda. Kemungkinan koalisi dari triad dibangun atas sejumlah asumsi berikut:

- a. Anggota triad mungkin berbeda kekuatannya. Anggota yang lebih kuat dapat mengontrol anggota yang lebih lemah, dan akan berusaha melakukannya.
- b. Setiap anggota triad mencari kontrol anggota yang lain. Kontrol atas dua yang lain lebih disukai daripada mengontrol satu lainnya. Kontrol atas satu yang lain dipilih daripada tidak ada yang dikontrol.
- c. Kekuatan adalah bertambah. Kekuatan koalisi adalah setara dengan jumlah kekuatan dari dua anggota.
- d. Formasi koalisi berlangsung dalam situasi triadik, dengan demikian ada suatu kondisi pra-koalisi di setiap triad (Caplow dalam Jurnal *A Theory of Coalition in The Triad*, 1986).

2.1.3 Teoritikal Terbentuknya Koalisi Partai Politik

Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi kelanjutan dan perkembangan sistem partai. (Lijphart dalam Cipto, 2000:23-27) membagi teori koalisi ke dalam lima teori utama yaitu:

a. *Minimal Winning Coalition*

Menurut teori *Minimal Winning Coalition*, disusun berdasarkan kecenderungan ideologi kiri hingga kanan. Koalisi, dengan demikian, dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan spektrum ideologi. Teori *Minimal Winning Coalition* (MWC), yang pertama kali dikemukakan oleh William H. Riker dalam bukunya *The Theory of Political Coalitions* (1962), menjelaskan bagaimana partai politik membentuk koalisi dalam sistem pemerintahan parlementer atau presidensial. Teori ini berfokus pada pembentukan

koalisi yang minimal namun cukup untuk mencapai mayoritas dan memenangkan pemilihan atau agenda politik tertentu. Menurut Riker, ada beberapa indikator atau faktor yang mempengaruhi pembentukan *minimal winning coalition*, antara lain:

- 1) Jumlah Kursi yang Dibutuhkan
- 2) Kebutuhan akan Keuntungan Politik
- 3) Strategi Rasional

b. *Minimum Size Coalitions*

Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.

c. *Bargaining Proposition*

Teori ini disebut juga dengan koalisi dengan jumlah partai paling sedikit maka koalisi dengan jumlah partai terkecil. Prinsip dasar koalisi ini adalah memudahkan proses negoisasi dan tawar-menawar karenan anggota atau rekanan koalisinya hanya sedikit.

d. *Minimal Range Coalitions*

Dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet. Akan tetapi koalisi ini tidak mudah terbentuk karen mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijaksanaan masing-masing partai.

e. *Minimal Connected Winning Coalitions*

Teori ini paling banyak diterapkan di dunia nyata. Dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksanannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai.

2.1.4 Motif Koalisi Partai Politik

Jumlah partai mempengaruhi tujuan koalisi dan masing-masing aktor koalisi memiliki tujuan khusus. Dalam sistem dua partai, berkoalisi merupakan sistem pengecualian. Koalisi dalam sistem dua partai biasanya terikat dengan situasi internal/eksternal yang membahayakan atau ketika dua partai tersebut menginginkan hal yang sama. Kemungkinan lain terjadinya koalisi dalam sistem dua partai adalah menyangkut koalisi isu-isu tertentu.

Sementara itu dalam sistem banyak partai tidak diperlukan koalisi jika salah satu partai memiliki suara mayoritas yang mutlak. Meskipun demikian, ada beberapa kasus bahwa partai pemenang memilih berkoalisi dengan partai lainnya untuk berbagi tanggung jawab kekuasaan, sebab koalisi dalam sistem multi partai memperkuat posisi partai di parlemen. Koalisi berfungsi memaksimalkan keuntungan, menginginkan satu hal, beberapa aktor menganggap kemenangan lebih berarti daripada yang lainnya dan ketika tidak menguntungkan ia keluar.

Menurut William Riker (1962) mengajukan teori koalisi yang berorientasi pada kebijakan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi. Mendapatkan kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir

dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Sehingga ini memungkinkan bagi partai-partai yang memiliki ideologi kurang lebih sama untuk melakukan koalisi (Swaan dalam Ekawati dalam Jurnal Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 2015).

Teori ini berbeda dengan Katz dan Mair yang menyatakan bahwa semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka dan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan partai kartel. Kartelisasi didefinisikan sebagai situasi dimana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu kelompok (Kartz dan Mair dalam Sumadinata dalam Jurnal Dinamika Koalisi Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014, 2016).

2.2 Tinjauan Tentang Partai Politik

2.2.1 Definisi Partai Politik

Menurut Sulistyowati (2009) dalam buku Wibowo (2017:5) partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

Menurut Budiardjo (2003) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir setiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara inkonstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Carl J. Friedrich (Budiardjo 2017:14) mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua *nation-state* di dunia sudah memiliki partai politik.

Partai politik dalam artian modern adalah salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merubah kebijakan atau aturan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota. Menurut Neuman dalam buku (Wibowo, 2017:6) mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas

persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam menjalankan dan mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

2.2.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi dari partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan

masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Menurut

Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok (Miriam Budiardjo, 2003:406).

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaianya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

A.Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan

umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif nya dapat di tekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Sedangkan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban nya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel 4. Fungsi Partai Dalam Negara Demokrasi

	Artikulasi	Agregasi	Rekrutmen
Pemerintah	Melaksanakan kebijakan	Melanggengkan dukungan kepada pemerintah	Mengisi posisi-posisi pemerintahan
Opisipi	Mengembangkan alternatif	Mendapatkan dukungan untuk perubahan	Membangun kelompok orang yang kompeten

Sumber : Caton (2007:7)

2.2.3 Tipologi Partai Politik

Tipologi menurut (Katz dan Crotty, 2006:262) yang membagi partai politik ke dalam lima bagian yaitu;

- a. Kaukus Elit atau Partai Kader (1860-1920) Awal mula partai ini berasal dari parlemen. Pemilihnya amat terbatas dari kelas tertentu yaitu kelas atas dengan kontak pribadi dan rekrutmen elitnya hanya berasal dari kelas atas, rekrutmen sendiri dengan inisiatif privat.

- b. Partai Massa (1980-1950) Partai ini berasal dari luar parlemen. Muncul dari kelompok sosial khusus seperti kelompok etnis ataupun agama. Rekrutmen elit berasal dari internal didasarkan kelas atau agama dengan komitmen berbasis ideologi dan organisasi melalui sistem pendidikan di dalam partai.
- c. Catch-all, Partai Electoralis (1950 - sekarang) Asal usulnya yaitu dari massa partai, pertalian atau penyatuan antara massa dengan kelompok kepentingan. Pemilih dan dukungan sosial muncul dari kelas menengah melampaui kelompok pendukung inti. Rekrutmen elit sistemnya eksternal dengan beraneka ragam kelompok kepentingan.
- d. Partai Kartel (1950 - sekarang) Berasal dari penggabungan partai parlemen (dan kelompok kepentingan). Kemunculan pemilih dan dukungan sosial bersifat “regular cliente” yang menyediakan pertukaran dukungan untuk kebijakan yang menguntungkan. Rekrutmen elit terutama dari dalam struktur negara (birokrasi).
- e. Partai Firma Bisnis (1990 – sekarang) Asal usul partai ini berasal dari insiatif privat dari wirausahawan politisi. Kemunculan pemilih dan dukungan sosial berasal dari “pasar pemilih” dengan tingkat perpindahan tinggi, pemilih adalah konsumen. Rekrutmen elit sendiri dan inisiatif privat. Partai jenis ini bersifat tertutup dan berbeda dengan jenis partai politik pada umumnya.

Ahli selanjutnya yang juga melakukan klasifikasi terhadap partai politik adalah Kartz dalam (Jurdi, 2014:150). Kartz membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu:

- a. Partai Elit Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai

elit ini bersumber pada hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini.

- b. Partai Massa Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas lokal tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga berbasis agama.
- c. Partai Catch-All Partai jenis ini dipermukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berfikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye.
- d. Partai Kartel Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Dari sisi partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi (Kartz dan Mair dalam Jurnal The Cartel Party Thesis: A Restatement, 2009).
- e. Partai Integratif Partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok (Simon, 2005:11).

Selanjutnya, (Duverger, 1984:22-25) membagi tipologi partai berdasarkan kriteria jumlah partai yaitu:

- a. Sistem Multipartai Jumlah partai, ukuran besarnya, strukturnya dan organisasinya harus diperhitungkan secara stimulan. Dari segi jumlah, tipe-tipe sistem banyak partai secara teoritis tidak terbatas, tetapi secara praktis situasinya jauh lebih sederhana.

- b. Sistem Dua Partai Rupanya, tidak banyak terdapat sistem dua partai ini, dilihat dari segi kemungkinan matematik. Walaupun jumlah partai yang demikian tidaklah menjadi faktor disini, eksistensi suatu kelompok politik yang sangat kecil kadang-kadang juga dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.

Pada prinsipnya, ada tiga macam sistem kepartaian. Sebagaimana juga sistem kepartaian dalam lingkup klasifikasi Duverger yakni; sistem satu partai, sistem dua partai dan sistem banyak partai. Dalam hal ini (Sukarna dalam Jurdi, 2014:154-159) mengajukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dari tiga sistem ini yaitu:

- a. Sistem Satu Partai Menurut Sukarna sistem ini memiliki kelebihan yakni pimpinan partai politik yang mendapat dukungan secara meluas daripada pimpinan lain dalam partai itu akan selalu berada dalam kedudukan kekuasaan, baik dalam partai maupun negara. Kelemahannya antara lain adalah hak-hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan, baik kemerdekaan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya sangat dibatasi terutama dalam kemerdekaan berpolitik, mengingat masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih, kecuali memilih yang satu- satunya itu.
- b. Sistem Dua Partai Kelebihannya adalah dalam sistem dua partai memiliki kaitan erat dengan pemilu sistem distrik, selalu menghasilkan partai mayoritas dalam pemilu, yaitu sebagai sarat pemerintahan atau kabinet yang mendapat dukungan dari parlemen.
- c. Sistem Banyak Partai Kelemahan sistem ini menurut Sukarna adalah lahir karena banyak ideologi yang dianut, ideologi itu sendiri berarti suatu hasil pemikiran manusia tentang politik, sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan suatu ajaran hingga rentan konflik.

2.2.4 Pembagian Arena Kompetisi Partai

Robert Dahl, telah mengidentifikasi multiple arenas dari kompetisi politik yakni: arena pemilu, arena legislatif, arena birokrasi, arena pemerintah daerah, dan banyak lagi. Masing-masing diantaranya bisa jadi arena yang paling menentukan sikap politik partai, terutama dalam mencapai tujuannya. (Dahl dalam Giorgi dalam Jurnal Parliamentary Oposition in Western European Democracies Today, 2007).

Sebuah studi kontemporer di tahun 1999 menjelaskan dilema yang berkelanjutan yang dihadapi partai politik dalam membuat keputusan berkaitan dengan konflik tujuan. Demi mempertahankan dukungan dalam pemilu, partai mungkin mengorbankan tujuannya yang lain dalam memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih jabatan. Dilema kemudian tumbuh ketika partai membutuhkan koalisi untuk membentuk sebuah pemerintahan, namun partner yang potensial disertai dengan haluan ideologi yang sama tidak memiliki suara yang cukup untuk duduk di kursi pemerintahan (Muller dan Strom, 1999: 3).

Dilema dapat juga terjadi ketika partai politik dihadapkan pada pilihan antara berpegang teguh dengan komitmen kebijakan dan memperoleh jabatan. Pilihan pertama pasti akan mengalahkan pilihan kedua, dan begitupun sebaliknya. Maka demikian, dalam dilema tersebut sebuah partai mungkin untuk merubah perilakunya demi mencapai tujuannya.

2.2.5 Pragmatisme Partai Politik

Secara filsafatis, pragmatisme dapat diterjemahkan sebagai ajaran yang menekankan bahwa sebuah bentuk pemikiran mengikuti tindakan. Kriteria kebenarannya yakni 'faedah' atau 'manfaat'. Artinya, suatu teori maupun hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila bisa diaplikasikan dan membawa manfaat (Bunning dan Forster, 1997: 140-141).

Pierce mengatakan bahwa terdapat dua poin yang menjadi pertimbangan kaum pragmatis dalam bertindak. Pertama adalah berupa ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan yang kedua yakni tujuan dari tindakan itu sendiri (Pierce dalam Bunning dan Forster, 1997: 147).

Manusia memiliki ide atau keyakinan yang ingin direalisasikan dan memiliki tujuan tertentu, yang mana sekaligus merupakan konsekuensi praktis atas sebuah tindakan. Sehingga, bagi Pierce, apa yang dikatakan sebagai prinsip pragmatis dalam arti yang sebenarnya yakni suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan (Pierce dalam Bunning dan Forster, 1997: 143).

Namun, pada perkembangannya, pragmatisme berkembang tidak hanya pada konteks 'mendamaikan' filosofis dan metafisik, namun juga telah masuk ke dalam tataran politik terutama dalam tubuh partai politik. Jika pada pragmatisme menyatakan bahwa segala jenis ide atau gagasan akan benar apabila memiliki manfaat secara praktis karena memiliki tujuan yang jelas, maka politik pun demikian.

2.2.6 Pembilahan Sosial dan Ideologi Partai Politik

Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy yang mengartikan ideologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang eksistensi ide. Ideologi juga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang ide. Berbagai kamus, menjelaskan bahwa ide bermakna juga gagasan, cita-cita, rancangan yang tersusun dalam pikiran manusia, atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Artinya, ide senantiasa berkaitan dengan pemikiran dan penalaran manusia (Arifin, 2014: 113).

Setiap bangsa di dunia ini masing-masing memiliki nilai-nilai dasar dan pandangan hidup atau ideologi sendiri yang pada umumnya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, sesuai dengan latar belakang historis dan sosial kultural masing-masing negara dan bangsa. Pandangan hidup bangsa (way of life of nation) itu pada umumnya dilembagakan dalam konstitusi dan membentuk suatu sistem.

Ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini adalah kemana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apayang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. dengan dasar ideologilah partai itu akan bergerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Bersama ideologinya masing-masing partai politik itu akan mempunyai identitas yang jelas, hal tersebutlah kemudian yang

memudahkan partai politik tersebut dalam mendapatkan massa pendukung. Di sisi yang lain masyarakat pun akan lebih mudah untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan keinginan yang memang memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. (Prasetya dalam Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik, 2011).

a. Partai Nasdem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Pancasila yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011 (AD/ART Partai NasDem Pasal 1). Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat (inilah.com diakses pada 23 Mei 2024 pukul 19:15 WIB).

Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia (detikNews.com diakses pada 23 Mei 2024 pukul 19:20 WIB). Partai NasDem memakai konsep Restorasi Indonesia sebagai salah satu kegiatan andalannya.

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS merupakan partai yang berdiri pada masa pasca Orde Baru, dideklarasikan pada April 2003 sebagai keberlanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih. Partai ini didirikan oleh orang-orang dengan latar belakang aktivis

keagamaan berbasis kampus, terutama sekali di kampus-kampus sekuler. Basis pendukung PKS adalah pembilahan sosial dengan karakteristik kelas menengah atas, kaum terdidik dan Islam (Pamungkas, 2011: 137).

PKS merupakan partai dengan basis ideologi Islam modernis dan dengan pengorganisasian partai yang solid. Pemikiran pemikiran Ikhwanul Muslimin sangat mewarnai partai. Dalam debat-debat regulasi partai ini banyak mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik Islam. Meskipun demikian, partai ini relatif inklusif dalam membangun kerjasama dengan partai lain seperti terlihat dalam koalisi pilkada dan program partai.

c. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi Moderat. Partai ini didirikan oleh Presiden Indonesia ke-4 Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, Lc. di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriah) yang mendapat dukungan kuat dari para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Mustofa Bisri, Zuhdi Fatkur dan Muhith Muzadi.

Pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa berawal pada pertemuan para kiai Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Faqih. Dalam pertemuan pada Mei 1998 membicarakan mengenai situasi terakhir negeri dan perlu adanya perubahan besar untuk menyelamatkan bangsadari kehancuran. Mereka mengembangkan pernyataan resmi, yang dikirim oleh Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammad untuk disampaikan kepada Presiden Soeharto.

2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub)

2.3.1 Pengertian Pemilihan Gubernur (Pilgub)

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis (Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016).

Sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite. Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

2.3.2 Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*) (Budiardjo, 2008:461).

2.3.3 Pemilihan Kepada Daerah

Seperti halnya dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, sebelumnya dipilih melalui perwakilan di DPRD. Tetapi karena arus reformasi untuk penegakan demokrasi secara murni, maka pemilihan pimpinan daerah mulai tahun 2004 sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dilakukan secara langsung oleh rakyat (*one man one vote*).

Masalah krusial yang bisa timbul dalam pilkada sehingga bisa memicu terjadinya tindak kekerasan atau anarkis, antara lain;

- a. Terjadinya pemilihan langsung menyebabkan banyak tangan yang harus ikut campur, mulai dari pemerintah, DPRD, partai politik, KPU, Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas Independen (Pawaslu).

- b. Pemerintah daerah juga mengatur pilkada yang tertuang dalam peraturan pemerintah, terutama bertanggung jawab atas dana dan anggaran pilkada (Cangara, 2016: 218).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik jika mampu dikelola dengan benar, dan diharapkan setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi perkembangan demokrasi menjadi lebih berkualitas, sebab kondisi awal yang mendukung peningkatan demokrasi mulai terbentuk seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa untuk mewujudkan demokrasi dibutuhkan kondisi awal yang memadai untuk mendukung perkembangannya, yaitu:

- a. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.
- b. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
- c. Adanya kemudahan akses untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan alternatifnya.
- d. Adanya otonomi asosiasional.
- e. Dibangunnya pemerintahan perwakilan.
- f. Terdapatnya hak warga negara yang inklusif.

(Agustino dalam Rahmawati dalam Jurnal Perilaku Pemilih Golput Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008, 2015). Pelaksanaan Pemilukada secara langsung, dalam implementasinya rakyat dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, cerdas terhadap tawaran yang diberikan oleh para calon kepala daerah, serta menentukan siapakah yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Karena itu partai politik harus berhati-hati dalam mengajukan tokoh yang akan dijadikan sebagai calon kepala daerah, mengingat partai politik yang mengajukan tidak hanya satu maka dibutuhkan aturan main yang jelas, adil dan tidak memihak oleh lembaga atau komisi yang netral yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. (Yuliono dalam Jurnal Kepercayaan Masyarakat pada Partai Politik, 2013).

Ada berbagai bentuk pemilihan sebagai proses dan praktek dari konsep demokrasi. Sistem pemilihan kepala daerah langsung yang digunakan Indonesia saat ini secara teoritis dapat dikatakan sebagai bagian dari Pemilu. Pilkada langsung dapat dikatakan sebagai pemilu karena pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah yang memiliki dua prasyarat dasar, yaitu rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang didukungnya dan calon-calon bersaing dalam satu medan permainan dengan aturan main yang sama.

2.4 Konsep Orientasi Koalisi

2.4.1 Definisi Orientasi Koalisi

Orientasi koalisi dalam kajian ilmu politik merujuk pada kecenderungan atau arah tujuan yang melandasi pembentukan dan pengelolaan koalisi antarpolitik maupun antaraktor politik. Menurut Riker (1962) dalam *The Theory of Political Coalitions*, orientasi koalisi dapat dilihat dari motif atau rasionalitas para aktor politik dalam membentuk aliansi, yang dapat bersifat ideologis, pragmatis, maupun strategis untuk mencapai kekuasaan. Dalam konteks ini, orientasi idealis atau ideologis adalah pola koalisi yang dibangun atas dasar kesamaan nilai, visi, dan platform politik yang berpijak pada tujuan jangka panjang, seperti penerapan prinsip demokrasi, keadilan sosial, atau agenda pembangunan tertentu. Koalisi berorientasi idealis cenderung mengutamakan konsistensi nilai dan kesamaan program, meskipun terkadang mengorbankan keuntungan elektoral jangka pendek. Sebaliknya, orientasi pragmatis memandang koalisi sebagai instrumen taktis untuk meraih kemenangan politik, memperoleh kursi kekuasaan, atau mengamankan kepentingan praktis tertentu. Orientasi ini lebih fleksibel, mengedepankan kalkulasi keuntungan politik dan elektoral, serta bersifat adaptif terhadap dinamika politik, meskipun berisiko mengabaikan konsistensi nilai ideologis.

Fungsi orientasi koalisi dapat dilihat dari perannya dalam proses konsolidasi politik dan efektivitas pemerintahan. Pertama, orientasi koalisi berfungsi sebagai mekanisme penguatan dukungan politik, baik di parlemen maupun di tingkat masyarakat, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Kedua, orientasi koalisi menjadi instrumen stabilisasi sistem politik dengan meminimalisasi konflik antarpolisi melalui pembentukan kesepakatan bersama. Ketiga, orientasi koalisi berperan dalam pembentukan agenda kebijakan yang lebih inklusif, terutama pada koalisi dengan orientasi idealis yang mengutamakan kesamaan program dan visi. Namun, pada orientasi pragmatis, fungsi koalisi cenderung lebih terfokus pada efisiensi perolehan kekuasaan dan pembagian sumber daya politik. Dengan demikian, pemahaman terhadap orientasi idealis dan pragmatis dalam koalisi menjadi penting untuk menganalisis motivasi, dinamika, dan implikasi politik dari aliansi yang terbentuk, baik dalam konteks pemilihan umum maupun penyelenggaraan pemerintahan.

2.4.2 Orientasi Koalisi Idealis

Orientasi koalisi idealis dibangun atas dasar kesamaan nilai, ideologi, dan visi politik antarpolisi yang bergabung di dalamnya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan agenda jangka panjang yang selaras dengan platform politik yang telah disepakati bersama. Karakteristik utama orientasi ini adalah konsistensi pada prinsip dan program politik, meskipun hal tersebut berpotensi mengurangi peluang kemenangan elektoral. Indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orientasi idealis antara lain adanya kesamaan program dan visi antarpolisi, konsistensi platform politik dari waktu ke waktu, serta fokus pada kepentingan publik. Fungsi utama orientasi idealis adalah menjamin konsistensi agenda kebijakan dan memperkuat legitimasi politik berbasis nilai, walaupun risikonya adalah potensi kekalahan dalam kompetisi elektoral apabila dukungan publik terbatas.

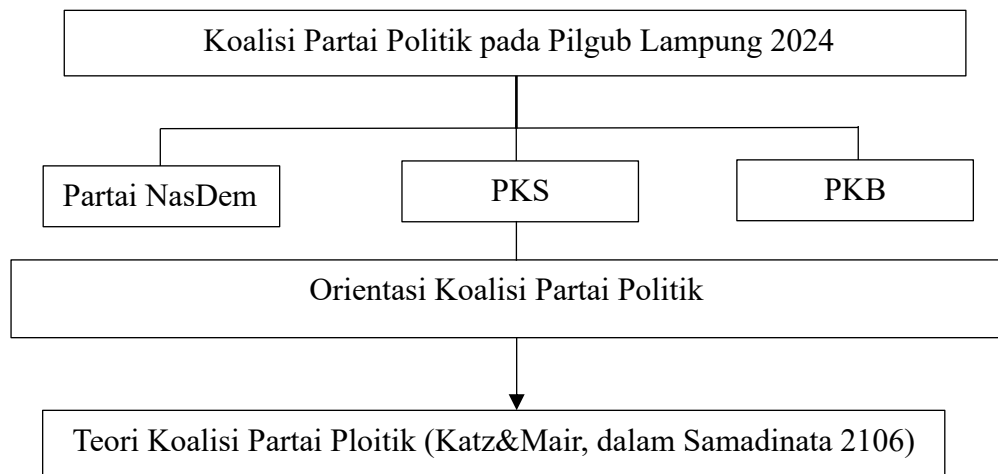
2.4.3 Orientasi Koalisi Pragmatis

Orientasi koalisi pragmatis dibentuk berdasarkan kalkulasi keuntungan politik dan elektoral yang dapat diperoleh melalui aliansi strategis. Tujuan utamanya adalah meraih kekuasaan, mengamankan posisi politik, atau memperluas pengaruh di arena politik. Orientasi ini memiliki karakteristik fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap dinamika politik, meskipun terkadang mengorbankan prinsip atau konsistensi ideologis. Indikatornya meliputi fleksibilitas dalam memilih mitra koalisi, fokus pada negosiasi posisi jabatan atau pembagian kekuasaan, serta prioritas pada kepentingan elektoral dibandingkan konsistensi nilai. Fungsi utama orientasi pragmatis adalah mempercepat perolehan kekuasaan dan memaksimalkan distribusi sumber daya politik, namun risikonya adalah menurunnya legitimasi di mata publik karena dianggap oportunis atau inkonsisten. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua orientasi ini menjadi penting dalam menganalisis motivasi, strategi, dan implikasi pembentukan koalisi politik, baik dalam konteks kontestasi elektoral maupun pengelolaan pemerintahan.

2.5 Kerangka Pikir

Penulis memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Koalisi Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 (Studi pada Partai Politik NasDem, PKB, dan PKS)” menjelaskan dilema yang berkelanjutan yang dihadapi partai politik dalam membuat keputusan berkaitan dengan konflik tujuan. Demi mempertahankan dukungan dalam pemilu, partai mungkin mengorbankan tujuannya yang lain dalam memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih jabatan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian

Gambar 3. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah oleh Peneliti

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus,2012:10). Penelitian terhadap Koalisi Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 (Studi pada Partai Politik NasDem, PKS, dan PKB) menggunakan tipe Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong,2014:5).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Eko,2015:8). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Arikunto (2010:5) metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara. Selanjutnya yaitu pengkajian mengenai konflik yang melibatkan eksekutif dan legislatif ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dengan metode Penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Burhan, 2012:41). Penelitian ialah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah orientasi koalisi partai politik pada Pemilihan Gubernur pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung tahun 2024 (Studi pada Partai Politik NasDem, PKB, dan PKS Provinsi Lampung).

3.3 Penentuan Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif *fenomenologis*, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9). Berikut adalah data informan dalam penelitian ini :

Tabel 5. Data Informan Dalam Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan Dalam Instansi
1	Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem DPW Lampung
2	Aep Saripudin	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Partai PKS
3	Dra. Jauharoh Haddad, M.M	Sekretaris PKB DPW Provinsi Lampung
4	Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP	Pengamat Politik Universitas Lampung
5	Imam Santosa, S.Sos	Tim Sukses Mirzani-Jihan

Sumber :Diolah oleh Peneliti

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Menurut Ridwan (2008:69), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proses belajar mengajar dan beberapa dokumen berupa data penunjang peran dari fraksi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan akurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moleong,2017:186).

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini berbagai jawaban diutarakan. Jadi,

wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated under standings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang Peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009:495).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara Peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola Media yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo, 2002:119). Jadi wawancara diartikan sebagai proses interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai orang, organisasi, fenomena, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang di wawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi

menjadi observasi partisipan (*participant observation*), partisipasi non-partisipan (*non-participant observation*) dan observasi terhadap objek (Widi, 2010:237-238).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas kelompok yang diteliti sebab menyusun strategi dan rencana koalisi suatu partai politik dalam menghadapi pemilihan umum sifatnya rahasia dan tertutup. Teknik observasi digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008:240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel,1998), prosesnya berjalan sebagai berikut:

Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber data nya tetap dapat di telusuri, Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian

data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final nya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus Penelitian.

2. *Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Misalnya, data yang mendukung Penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan Peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan Penelitian. Kegiatan Peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan Penelitian yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan Penelitian ini. Kemudian Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data di analisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana di kemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Denzin (dalam Patton, 2015:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam Penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331) sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan nya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitian nya sehingga uraiannya itu dilakukan peteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian nya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung jawaban.

3. Kebergantungan (*Dependity*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam Penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam

suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam Penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengandisepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

Memeriksa kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Partai NasDem

Pada awal pembentukannya NasDem merupakan organisasi masyarakat yang didirikan pada tahun 2009, yang bertujuan untuk mewadahi idealisme dari para tokoh-tokoh Indonesia dan meluruskan cita-cita reformasi yang dianggap sudah tidak lagi dijalankan. Tahun 2010 Ormas NasDem sudah mulai terbentuk di seluruh daerah di Indonesia di bawah kepemimpinan Patrice Rio Capella dan hal ini yang menjadi awal pembentukan Partai Nasdem yang sebelumnya merupakan organisasi masyarakat.

Deklarasi Partai NasDem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Deklarasi Partai NasDem hanyalah salah satu tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini, guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. (www.partainasdem.org).

Kongres I Partai NasDem yang digelar pada tanggal 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem, berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini, satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar

pukul 23.00 WIB, seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun. (Dokumentasi DPW Partai NasDem Provinsi Lampung).

Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai, amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Bukan cuma itu, kongres juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014. (Dokumentasi DPW Partai NasDem Provinsi Lampung).

Resmi menjadi partai, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu, bersama dengan 46 parpol yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014, Partai NasDem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU satu di antaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berniat ikut pemilu legislatif tahun 2014, KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012, akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi dan KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 18 partai gugur. (Sumber : www.kpu.go.id).

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi untuk pemilu legislatif tahun 2014 adalah Partai NasDem. Dari 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, KPU menilai Partai NasDem lolos verifikasi administrasi dengan kualifikasi terbaik. Parpol yang lolos verifikasi administrasi berhak mengikuti verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung KPU ke lapangan

untuk mengecek infrastruktur parpol di setiap daerah disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi. Senin 7 Januari 2013 KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai NasDem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain:

- Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekrtaris Jenderal;
- Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan;
- Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014.

4.1.1 Visi dan Misi Partai Nasdem

Visi

Mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yakni Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Misi

Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia. (www.partainasdem.org).

Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Visi dan misi di atas disusun berdasarkan manifesto Partai NasDem saat pendeklarasian partai ini pada 26 Juli 2011. Isi lengkap Manifesto Partai NasDem adalah sebagai berikut:

"Negara diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945". Mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat.

Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar, namun tidak pernah mewujudkan. Di sinilah Negara Indonesia yang merdeka, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut berbangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama, reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas ke mana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi berjalan tanpa bimbingan. Ideologi politik tanpa program politik yang konsisten dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. Kami menolak demokrasi yang sekadar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. NasDem menolak demokrasi yang hanya melahirkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. NasDem menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. NasDem menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

NasDem mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut satu masa

depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun satu negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem lahir sebagai keharusan sejarah, NasDem lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pascareformasi. NasDem berdiri tegak dengan semangat kebangsaan yang kuat, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat melalui Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional. Kami persembahkan Partai NasDem untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang kami cintai hingga akhir hayat. (www.partainasdem.org).

4.2 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjutan perjuangan Partai Keadilan (PK). Pada tanggal 20 juli 1998 Partai Keadilan didirikan di jakarta yang dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Setelah dinyatakan lolos verifikasi Partai Keadilan (PK) ikut dalam pemilu 1999 dan meraih 1,4 juta suara. Karena terhambat ketentuan undang-undang pemilu tentang *electrical threshold*, maka para pemimpin Partai Keadilan memutuskan untuk mendirikan sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera berdiri resmi pada tanggal 20 April 2002.

Berdasarkan hasil musyawarah nasional istimewa, merekomendasikan penggabungan Partai Keadilan dengan Partai Keadilan Sejahtera yaitu pada tanggal 3 juli 2003 yang dikukuhkan di kantor pengacara Tri sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak Partai Keadilan (PK) menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai kader yang berasaskan Islam. PKS biasa juga disebut partai dakwah, di mana pergerakan kadernya lebih militan jika dibanding dengan partai lain. Inilah perspektif baru sebuah partai di Indonesia berbeda dengan partai kebanyakan.

Perbedaan tersebut meliputi: Pertama, tidak seperti partai lain PKS mengambil sumber inspirasi ideologi dari luar yaitu dari pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Hasan Al Banna dan Sayyid Qutb sebagai inspirasi pergerakan dan berkiblat kesana. Kedua, Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini. Kebanyakan mereka yang duduk di kursi legislatif baik DPR dan DPRD adalah orang-orang yang merupakan anggota yang telah melalui proses seleksi internal yang demokratis. Ketiga, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan yang luas. Keempat, PKS menjadi moralitas dalam kehidupan masyarakat sebagai program utama partai. Pada umumnya kader yang dimiliki oleh PKS berasaskan dari kalangan agamawan/santri, kalangan akademis yang berada di wilayah perkotaan. Maka banyak uang

menyarankan bahwa bahwa PKS masih bersikap eksklusif dikalangan masyarakat apalagi di wilayah perdesaan. PKS lebih intensif dan konsisten dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya terhadap masyarakat. (sumber: AD/ART PKS tahun 2014).

4.2.1 Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi

Visi umum Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. Visi khusus Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadi partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Misi

- a. Menyebarluaskan dakwah islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir (kader yang berpotensi dan berkualitas)
- b. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- c. Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran islam yang solutif dan membawa rahmat
- d. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- e. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hokum dan etika islam.
- f. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk

terwujudnya ukhuwah islamiyah dan widhatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasi agenda reformasi.

- g. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. (sumber: AD/ART PKS tahun 2014).

4.3 Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berawal dari setelah runtuhnya era Orde Baru bersamaan dengan lengsernya Soeharto dari posisi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai politik yang memiliki hubungan erat dengan PBNU.

Pada waktu itu, PBNU menerima banyak usulan dari warga Nahdliyin di berbagai wilayah Indonesia yang menginginkan pembentukan badan atau partai politik untuk menyalurkan aspirasi mereka di seluruh negara. Muncul banyak aspirasi yang menimbulkan konflik. Ada 39 nama partai politik yang diusulkan, termasuk visi misi, rumusan AD/ART, dan calon pengurus parpol NU. PBNU mengakomodasi usulan-usulan tersebut, namun juga berhati-hati karena NU sebelumnya tidak terkait dengan partai politik berdasarkan keputusan Mukhtamar NU 1984.

Ketidakpuasan warga Nahdliyin terhadap sikap PBNU menghasilkan deklarasi beberapa partai politik berbasis NU, seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon. Pada tanggal 3 Juni 1998, PBNU mengadakan rapat dan membentuk Tim Lima yang dipimpin oleh K.H. Ma'ruf Amin untuk memenuhi aspirasi masyarakat Nahdliyin. Tim Asistensi juga terbentuk untuk membantu dalam menampung dan menginventarisasi usulan-usulan pembentukan partai politik baru dari kaum Nahdliyin.

Pada tanggal 23 Juni 1998, PKB terbentuk sebagai wadah aspirasi warga NU. Pendirian PKB dilakukan di kediaman Gus Dur, Ketua Umum PBNU, dengan kehadiran beberapa tokoh NU seperti KH Ilyas Rukhiat, KH Mustofa Bisri, KH Munasir Ali, dan KH Muchit Muzadi. Matori Abdul Djalil terpilih sebagai Ketua Umum PKB.

PKB ikut serta dalam pemilu tahun 1999 bersaing dengan 49 peserta lainnya. Partai ini berhasil memperoleh 13.321.837 suara atau 12,62% dan 51 kursi di DPR, menjadi prestasi yang mengagumkan sebagai partai politik pendatang baru. PKB mampu bersaing dengan partai politik yang telah lama berdiri seperti PDIP dan Partai Golkar. PKB juga berhasil mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih tua, menempati peringkat ke-4. Keberhasilan PKB ini tak lepas dari pengaruh dan penghormatan masyarakat terhadap sosok Gus Dur, terutama di kalangan Nahdliyin.

Pada pemilu tahun 2004, PKB mengalami penurunan suara dengan 11.989.564 suara atau 10,56% dan 52 kursi di DPR. Pada pemilu 2009 di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, PKB mengalami penurunan suara signifikan dengan hanya 5.149.122 suara atau 4,94% dan 27 kursi, hampir separuh dari hasil pemilu 2004.

Namun, PKB bangkit pada pemilu 2014 dengan suara memuaskan, yaitu 11.298.957 suara atau 9,04% dan 47 kursi di DPR. Pada pemilu 2019, PKB menempatkan KH. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden dan berhasil memenangkan Pilpres 2019. PKB meraih 13.570.097 suara atau 9,69% serta 58 kursi di DPR. PKB mengalami peningkatan suara dari pemilu sebelumnya.

4.3.1 Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa

Visi

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, dan;
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakku karimah.

Misi

1. Dalam bidang ekonomi adalah menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
2. Dalam bidang hukum, berusaha menegakkan negara hukum yang mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
3. Dalam bidang sosial budaya, membangun budaya maju dan modern dengan memelihara jati diri bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
4. Dalam bidang pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional, dan kritis terhadap lingkungan sosial. Mengusahakan sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah, dan berkesinambungan.
5. Dalam bidang pertahanan, membangun kesadaran warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara. Mendorong swabela masyarakat terhadap perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik dari individu maupun institusi dalam masyarakat.

4.4 Gambaran Umum Partai Koalisi Perubahan

Koalisi Perubahan, sebelumnya bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan Koalisi Semut Merah (KSM), adalah koalisi partai politik di Indonesia yang beranggotakan tiga partai politik parlemen, yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS untuk mengusung Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan sebagai

calon presiden serta Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya, salah satu inisiator Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat menarik mandat dukungannya atas Anies pada 1 September 2023. Kemudian, PKB dari Koalisi Indonesia Maju secara resmi bergabung pada 2 September 2023.

Partai Nasdem sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo mengajukan tiga nama sebagai calon presiden yang akan mereka dukung dan akhirnya memilih mendukung Anies Baswedan. Deklarasi ini kemudian mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Keadilan Sejahtera pada 2022, menggagas ikhtiar untuk membentuk poros baru dengan gagasan poros perubahan, yakni perubahan agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih demokratis, lebih bersatu dan berdaulat serta memiliki peran strategis di panggung politik global.

Pada Juni 2022, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa menjalin komunikasi dan membentuk Koalisi Semut Merah sebagai bentuk penajakan pembentukan poros tersebut. Kedua partai menyatakan membuka kemungkinan partai politik lain untuk bergabung. Namun, terjadi dinamika politik ketika PKB bersama dengan Partai Gerindra membuat piagam politik berupa Piagam Sentul dan sepakat membentuk sekretariat bersama dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Agustus 2022.

Memasuki awal tahun 2023, Partai Demokrat melalui keputusannya memilih memajukan Anies Baswedan untuk menjadi capres. Selain itu, Demokrat juga menominasikan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pendampingnya. PKS yang digadang-gadang

akan mengusung Anies pun juga mengusulkan kadernya, Ahmad Heryawan sebagai cawapres. PKS sendiri akan menerima Agus apabila dia dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Di saat yang bersamaan, muncul spekulasi apabila Agus tidak dipilih sebagai pendamping Anies, maka Koalisi Perubahan tidak akan terbentuk yang disebabkan batalnya Demokrat untuk menjalin kesepakatan koalisi.

Pada akhirnya, PKS pada Februari 2023 mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Nama Anies ditetapkan berdasarkan keputusan majelis syura PKS. Meski terdapat tambahan dukungan, akan tetapi ia belum memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden. Akhirnya, Partai Demokrat menetapkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden, sehingga dia dapat maju dalam kontestasi politik ini setelah perolehan kursi dan suara dari partai pengusungnya memenuhi syarat ambang batas presiden. Kemudian ketiga partai pengusung sepakat bahwa Anies yang akan menentukan siapa pasangan calon wakil presidennya. Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jendral Partai Demokrat, menyatakan bahwa Ketua Umum ketiga partai pengusung akan menandatangani kontrak kerja sama secepatnya. Partai Ummat, partai bentukan pendiri PAN Amien Rais, di bulan yang sama juga menyatakan dukungan terhadap Anies. Namun, jika Anies batal maju dalam kontestasi pilpres, maka Partai Ummat akan menjadikan Prabowo sebagai capresnya.

Setelah pembentukan Koalisi Indonesia Maju pada akhir Agustus 2023, PKB memutuskan untuk keluar dari koalisi dan menyepakati kerja sama politik dengan Partai NasDem. Melalui kesepakatan politik inilah Anies dideklarasikan bersama dengan Muhaimin Iskandar maju dalam pemilihan presiden di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.

Dengan demikian, Anies Baswedan menjadi capres pertama mendeklarasikan cawapresnya. Demokrat sebagai salah satu inisiator Koalisi Perubahan menolak hadirnya PKB di koalisi untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres. Mereka mengklaim bahwa Anies terlebih dahulu menjanjikan Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi pendampingnya pada kontestasi pilpres. Konflik berlanjut hingga kader-kader di berbagai wilayah yang menurunkan papan reklame bergambar ketua umum Agus berdampingan dengan Anies. Efeknya, Demokrat menarik diri dari koalisi dan tidak lagi mendukung pencalonan Anies. Pada akhirnya, Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa orientasi koalisi partai politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2024 adalah cenderung bersifat pragmatis atau lebih kepada upaya memenangkan pemilu, memperkuat politik dengan parlemen dan menjalankan program atau kebijakan partai koalisi.

Partai NasDem memiliki program atau kebijakan dengan melakukan dukungan resmi kepada Calon Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebagai Calon Gubernur Lampung, Melakukan Konsolidasi Internal dan Bimtek Kader, Kolaborasi Koalisi dengan PKS guna memenuhi ambang batas kursi DPRD Lampung ($\geq 20\%$) yang dihasilkan dari gabungan 10 kursi NasDem dan 7 Kursi PKS, melakukan kampanye akbar dan kampanye moral, serta adanya program pengabdian masyarakat.

Partai PKS memiliki program atau kebijakan dengan melakukan peresmian tim penjaringan dan monitoring Pilgub Lampung guna menjalin komunikasi dengan calon yang potensial, menyelenggarakan konsolidasi pengamanan pemilu, mengoperasikan Pusat Pelayanan Rakyat (Puspera), meluncurkan program sosial ATM Beras dan Ketahanan Pangan, menggelar Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) dan melakukan kolaborasi dan formulasi kebijakan publik desa.

Partai PKB memiliki program atau kebijakan dengan melakukan penjaringan Partai melalui Muskercab, menyuarakan wacana Pilkada

melalui DPRD, kolaborasi dengan tokoh lokal, serta melakukan pendekatan publik dan perluasan sosial.

Dalam konteks Pilgub Lampung 2024, pencalonan pasangan Mirza-Jihan melalui Koalisi menunjukkan perencanaan politik yang matang dengan memperhitungkan beberapa aspek strategis yang sangat krusial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koalisi ini memiliki dukungan yang solid untuk mencalonkan pasangan Mirza-Jihan. Orientasi birokrasi dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Koalisi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk meraih kemenangan elektoral sekaligus untuk memastikan akses kekuasaan yang lebih besar dalam pemerintahan yang akan datang. Keuntungan politik yang dicari oleh partai-partai dalam koalisi ini tidak hanya berkisar pada perolehan suara, tetapi juga pada kontrol terhadap birokrasi pemerintahan, yang dianggap sebagai instrumen penting dalam menjalankan kebijakan dan mengelola anggaran. Secara keseluruhan, pembentukan koalisi ini lebih dari sekadar mengumpulkan kursi atau meraih kemenangan pemilu; ia juga berfokus pada pengaturan kekuasaan di pemerintahan dan birokrasi, dengan tujuan untuk memperkuat posisi politik partai-partai koalisi dan memastikan bahwa program-program yang mereka usung dapat diimplementasikan dengan efektif.

6.2 Saran

1. Pentingnya Penguatan Konsolidasi antar Partai Koalisi. Diperlukan adanya komunikasi politik yang lebih intensif dan terbuka di antara partai-partai koalisi guna menjaga kesamaan visi dan ideologi yang telah disepakati di tingkat nasional. Ketidaksinkronan pada tataran lokal seperti yang terjadi dalam Pilgub Lampung mencerminkan lemahnya internalisasi ideologi bersama. Oleh karena itu, konsolidasi ideologis perlu dijaga dan diformalkan dalam platform koalisi yang mengikat, tidak hanya bersifat simbolik.
2. Formalisasi Kesepahaman atas Tujuan Politik Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Koalisi hendaknya menyusun dan menyepakati tujuan politik yang konkret dan terukur di setiap tingkatan pemilu, baik pusat maupun daerah. Ketidaktercerminnya Koalisi Perubahan secara utuh di tingkat daerah menunjukkan bahwa tujuan bersama belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam strategi politik lokal. Oleh karena itu, disarankan agar koalisi menetapkan mekanisme koordinasi lintas tingkatan yang menjamin keselarasan tujuan antara DPP dan DPW/DPC partai.
3. Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Peran Strategis Untuk mempertahankan keutuhan koalisi hingga ke level lokal, perlu adanya transparansi dalam proses pencalonan kepala daerah serta pembagian peran dan posisi strategis. Keadilan dalam pembagian kekuasaan menjadi kunci keberlanjutan koalisi. Oleh karena itu, partai-partai koalisi perlu menyusun tata kelola internal yang berbasis musyawarah mufakat dan menghormati keseimbangan kekuatan politik antar anggota koalisi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ali Moertopo, 1974. *Strategi Politik Nasional*. CSIS. Jakarta
- Anis, Kandung. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arend Liphart. 1995. *Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta
- Arifin A, 2006. *Pencitraan Dalam Politik (Strategi Pemenangan PEMILU Dalam Perspektif Komunikasi Politik)*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Hakim, Redi Panuju. *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DPC PDI PERJUANGAN SURABAYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019*. (Jurnal. Universitas dr Soetomo Surabaya. 2019)
- Agus, M Hardjaja. 2002. *Stres Tanpa Distres: Seni Mengolah Stress*. Yogyakarta: Kanisius
- Ariel Kristianto Pura. *STRATEGI PEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA DI DESA BUO KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMEHERA BARAT TAHUN 2019*. (Jurnal. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. 2019)
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. 528 halaman.
- Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Pustaka Indonesia: Jakarta. 222 halaman.
- Budiarjo Miriam, 2003, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandler, Jr. 1962. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 560 hlm.
- Caton, Mathias. 2007. *Effective Party Assistance: Stronger Parties for Better Democracy*. Internastional IDEA: Swedes. 319 halaman.
- Cipto, Bambang. 2000. *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta. 177 halaman.
- Djojosoekarto, Agung and Utama Sandjaya (edisi). 2008. *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*. Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Paractice in Europe and Americ*. Waltham, Mass. Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Gie, The Liang. 1978. *Ilmu Politik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 129 halaman.
- Glaser, Barney G dan Anslem L Strauss. 2006. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. A Division of Transaction Publishers: United Stated of America, London. 271 halaman.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. PT Grafindo: Jakarta. 272 halaman.
- H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Jenifer Pesak, Daysi Posumah, Trilke Tulung. *STRATEGI PEMENANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019*. (Jurnal. FISIP UNSRAT 2019)
- John A. Byrne, D, (2012). *Social Psychology: Thirteenth Edition*. United States: Pearson Education. Inc
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 410 hlm.

- Moleong, L.J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 410 hlm.
- Miles dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. In Jakarta: UIP. 492 hlm.
- Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung : Alfabeta.
- Subagyo, Joko. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES.